

POKJA Papua Cerdas

LAPORAN BULANAN

OKTOBER 2025

Sekretariat BADAN PENGARAH PA



| 2025



CAPAIN KINERJA PEMBANGUNAN PAPUA CERDAS – PAPUA BARAT, 2025

INDIKATOR KUNCI PILAR PAPUA CERDAS

Harapan Lama Sekolah (tahun)

▲ **13,17**

Baseline (2021): 13,21

Target (2041) : 14,59 – 16,61

Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)

▲ **7,86**

Baseline (2021): 7,84

Target (2041) : : 9,36 – 10,37

Sumber Data: RIPPP & BPS, 2025

KEGIATAN STRATEGIS-1

Dokumentasi Kegiatan Strategis #1



Photo: Peserta Diskusi Kelompok Terpumpun Kebhinekaan di Sentani Jayapura

Peserta Diskusi:

- Balai Bahasa Provinsi Papua
- BPP-RI se- Tanah Papua.

Sentani, 9-11 Oktober 2025, BPP Ri Provinsi Papua Barat melalui POKJA Papua Cerdas diundang untuk mengikuti Diskusi Kelompok Terpumpun Kebhinekaan: Sinergi Perlindungan Bahasa dan Sastra. Tujuan utama diskusi yaitu penyelarasan Visi, Rencana Strategi, dan Langkah Konkret antara Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan BPP se Tanah Papua, untuk perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah Papua. Fungsi SHEK yang dilaksanakan POKJA Papua Cerdas, yaitu Koordinasi dan Sinergitas Visi dan Rencana Strategis BPP dengan Balai Bahasa Provinsi Papua. Diskusi terpumpun tersebut, menghasilkan beberapa rekomendasi, diantaranya:

- Telah dilakukan penandatanganan MoU antara Badan Bahasa KEMENDIKDASMEN, Balai Bahasa Papua, dan BPP RI se- Tanah Papua.
- Telah disepakati sinergitas Program Pembinaan, Perlindungan, dan Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah Papua antara Badan Bahasa KEMENDIKDASMEN, Balai Bahasa Papua, dan BPP RI se- Tanah Papua.

CAPAIN KINERJA PEMBANGUNAN PAPUA CERDAS PAPUA BARAT, SAMPAI 2025

INDIKATOR KUNCI PILAR PAPUA CERDAS

Harapan Lama Sekolah (tahun)

▲ **13,17**

Baseline (2021): 13,21

Target (2041) : 14,59 – 16,61

Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)

▲ **7,86**

Baseline (2021): 7,84

Target (2041) : : 9,36 – 10,37

Sumber Data: RIPPP & BPS, 2025

KEGIATAN STRATEGIS-2

Dokumentasi Kegiatan Strategis #2



Peserta Diskusi:

- Balai Bahasa Provinsi Papua
- KEMENDIKDASMEN RI
- BPP/BP3OKP Se Tanah Papua
- Perwakilan Kabupaten/Kota se- Tanah Papua

Photo: Peserta Festival Tunas Bahasa Ibu Tingkat Papua Tahun 2025 di Sorong – Papua Barat Daya

Sorong, 20-22 Oktober 2025. BPP-RI Perwakilan Papua Barat diundang menghadiri Festival Tunas Bahasa Ibu Tingkat Papua tahun 2025, yang diselenggarakan di Hotel Vega Kota Sorong. Tujuannya untuk melestarikan Bahasa Daerah dan Revitalisasi Bahasa Daerah melalui Peningkatan Kemampuan Berbahasa serta Sastra Generasi Muda Papua. Hasil utama dari pertemuan tersebut yaitu Terdistribusi bahan ajar, yang mana program ini berhasil mengimplementasikan pembelajaran bahasa daerah di sekolah dan komunitas, yang menjadi dasar bagi peserta festival. Kehadiran BPP/BP3OKP RI Perwakilan Papua Barat pada pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu melaksanakan fungsi SHEK (Fungsi Harmonisasi) untuk mengintegrasikan Program Strategis Papua Cerdas untuk mendorong akselerasi Bahasa Daerah sebagai Mata Pelajaran Muatan Lokal di Satuan Pendidikan secara berkelanjutan. Rekomendasi penting yang disimpulkan dalam pertemuan tersebut, antara:

- **Integrasi ke kurikulum daerah** → Mendorong Pemerintah daerah untuk mengintegrasikan atau memperkuat bahasa daerah sebagai mata pelajaran muatan lokal di sekolah secara berkelanjutan.
- **Peningkatan Kolaborasi** → Memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, Balai Bahasa, komunitas adat, dan institusi pendidikan untuk memastikan program revitalisasi terus berjalan.
- **Pengembangan media pembelajaran** → Mengembangkan materi dan media pembelajaran bahasa daerah yang lebih menarik dan relevan bagi generasi muda

CAPAIN KINERJA PEMBANGUNAN PAPUA CERDAS PAPUA BARAT, SAMPAI 2025

INDIKATOR KUNCI PILAR PAPUA CERDAS

Harapan Lama Sekolah (tahun)

▲ **13,17**

Baseline (2021): 13,21

Target (2041) : 14,59 – 16,61

Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)

▲ **7,86**

Baseline (2021): 7,84

Target (2041) : 9,36 – 10,37

Sumber Data: RIPP & BPS, 2025

KEGIATAN STRATEGIS-3

Dokumentasi Kegiatan Strategis #3



Peserta Kunjungan Lapangan:

- POKJA Papua Cerdas
- POKJA Papua Produktif
- POKJA Papua Damai

Photo: Menyerahkan Rekomendasi kepada Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni & Kunjungan Lapangan ke Satuan Pendidikan

Bintuni, 20-24 Oktober 2025. BPP-RI Perwakilan Papua Barat melalui POKJA Papua Cerdas melakukan Kunjungan Kerja dalam rangka melaksanakan fungsi SHEK bidang Pendidikan di Kabupaten Teluk Bintuni. Tujuan kunjungan kerja yaitu memantau pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Dasar di Distrik Moskona Kabupaten Teluk Bintuni. Fungsi SHEK yang dilaksanakan pada saat kunjungan kerja yaitu Evaluasi dan Koordinasi penyelenggaraan Pendidikan antara Satuan Pendidikan di Wilayah Distrik dan penyelenggara Layanan Pendidikan (Dinas Pendidikan). Temuan sementara di lokasi kerja yaitu (1) Banyak ruang belajar yang belum memenuhi syarat belajar, (2) Guru yang masih kurang dengan keterampilan dasar, dan (3) Kesejahteraan guru masih rendah. Oleh karenanya, direkomendasikan:

- **Pembangunan & Rehabilitasi Sekolah Kontekstual** → Penerapan desain *modular school* atau bangunan adaptif dengan bahan lokal (kayu, bambu, atau bahan komposit tahan cuaca lembab).
- **Kemitraan Multipihak** → Mendorong keterlibatan perusahaan besar (seperti sektor migas, perikanan, dan perkebunan) melalui program CSR untuk mendukung pembangunan ruang belajar. Skema kolaborasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dengan Lembaga-lembaga keagamaan di Bintuni yang selama ini berpengalaman dalam mengelola Satuan Pendidikan yang ada

CAPAIN KINERJA PEMBANGUNAN PAPUA CERDAS PAPUA BARAT, SAMPAI 2025

INDIKATOR KUNCI PILAR PAPUA CERDAS

Harapan Lama Sekolah (tahun)

▲ **13,17**

Baseline (2021): 13,21

Target (2041) : 14,59 – 16,61

Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)

▲ **7,86**

Baseline (2021): 7,84

Target (2041) : : 9,36 – 10,37

Sumber Data: RIPP & BPS, 2025

KEGIATAN STRATEGIS-4

Dokumentasi Kegiatan Strategis #4

Photo: Peserta Rapat Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan

Manokwari, 30 Oktober 2025. BPP-RI Perwakilan Papua Barat diundang menghadiri Rapat Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan di Kantor Gubernur Papua Barat. Tujuannya untuk mengevaluasi pelaksanaan dan capaian kinerja dari Program Kesejahteraan Rakyat Urusan bidang Pendidikan di Papua Barat, berkenaan Implementasi Program Kartu Papua Cerdas dan Dukungan Bantuan Biaya Pendidikan kepada Mahasiswa OAP asal Provinsi Papua Barat, serta dukungan belanja pendidikan tingkat SMA dan SMK di Papua Barat. Kehadiran BPP/BP3OKP RI Perwakilan Papua Barat yaitu melaksanakan fungsi SHEK (Fungsi Koordinasi dan Evaluasi) untuk memastikan tujuan dan target penerima manfaat program, agar sejalan dengan RIPP & RAPP. Pertemuan tersebut telah menghasilkan beberapa hal penting sebagai berikut:

- **Penguatan Tata Kelola dan Integrasi Program Pendidikan Daerah** → Perlu dilakukan sinkronisasi data dan kebijakan antara Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta satuan pendidikan penerima manfaat dalam pelaksanaan program Kartu Papua Barat Cerdas (KPBC) dan dukungan bantuan pendidikan bagi mahasiswa Orang Asli Papua (OAP).
- **Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Daerah** → Pemerintah Provinsi Papua Barat perlu memperkuat implementasi Program Pendidikan Vokasi melalui Akademi Komunitas dengan dukungan kurikulum berbasis potensi lokal, kemitraan dunia usaha dan industri (DUDI), serta peningkatan kapasitas tenaga pengajar

Peserta Diskusi:

- Pemerintah Provinsi Papua Barat
- Majelis Rakyat Papua (Barat)
- BPP/BP3OKP RI Papua Barat
- Satuan Pendidikan dan Pemerhati Pendidikan di PB

CAPAIN KINERJA PEMBANGUNAN PAPUA CERDAS PAPUA BARAT, SAMPAI 2025

INDIKATOR KUNCI PILAR PAPUA CERDAS

Harapan Lama Sekolah (tahun)

▲ **13,17**

Baseline (2021): 13,21

Target (2041) : 14,59 – 16,61

Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)

▲ **7,86**

Baseline (2021): 7,84

Target (2041) : : 9,36 – 10,37

Sumber Data: RIPPP & BPS, 2025

KEGIATAN STRATEGIS LAINNYA

Dokumentasi Kegiatan Lainnya #01



Photo: Bersama Kabid Otsus Bappeda Papua Barat Melakukan Advokasi Kepada Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak

Manokwari, 2-3 Oktober 2025, bertempat di Kantor Bappeda Provinsi Papua Barat, Anggota POKJA BPP RI Papua Barat melakukan Rapat Koordinasi. Tujuan rapat koordinasi yaitu untuk penyelesaian syarat administrasi (syarat salur) pelaksanaan TKD Otsus termin/tahap II bagi Kabupaten Pegunungan Arfak. Fungsi SHEK yang dilaksanakan oleh BPP RI Perwakilan Papua Barat yaitu Evaluasi dan Koordinasi untuk memastikan Kabupaten Pegunungan Arfak dapat memenuhi syarat salur tahap II TKD dalam rangka pelaksanaan Otsus Papua. Hasil pertemuan tersebut, diantaranya:

- Pelaksanaan belanja daerah yang bersumber dari DOK yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak, diupayakan agar terus tertib administrasi dan harus tetap memperhatikan regulasi yang mengatur tentang perencanaan dan belanja. Sebagai misal, RAPPP dan PMK Nomor 33 Tahun 2024;
- Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak, berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi syarat salur sebagaimana regulasi yang ada, dan akan tetap melakukan komunikasi dan koordinasi kepada Bappeda Provinsi Papua Barat, jika terdapat hal-hal yang membutuhkan dukungan dan koordinasi lanjutan..

Peserta Diskusi:

- BAPPEDA Provinsi Papua Barat
- BAPPEDA Kabupaten Pegunungan Arfak
- BPP RI Perwakilan Papua Barat - POKJA Papua Cerdas

CAPAIN KINERJA PEMBANGUNAN PAPUA CERDAS PAPUA BARAT, SAMPAI 2025

INDIKATOR KUNCI PILAR PAPUA CERDAS

Harapan Lama Sekolah (tahun)

▲ **13,17**

Baseline (2021): 13,21

Target (2041) : 14,59 – 16,61

Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)

▲ **7,86**

Baseline (2021): 7,84

Target (2041) : : 9,36 – 10,37

Sumber Data: RIPP & BPS, 2025

KEGIATAN STRATEGIS LAINNYA

Dokumentasi Kegiatan Lainnya #02



Peserta Diskusi:

- BAPPEDA Provinsi Papua Barat
- BAPPEDA Kabupaten Manokwari
- BPP RI Perwakilan Papua Barat - POKJA Papua Cerdas

Photo: Bersama Kabid Otsus Bappeda Papua Barat Melakukan Advokasi Kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari

Manokwari, 6-8 Oktober 2025, bertempat di Kantor Bappeda Provinsi Papua Barat, Anggota POKJA BPP RI Papua Barat melakukan Rapat Koordinasi. Tujuan rapat koordinasi yaitu untuk pendampingan penyelesaian syarat administrasi (syarat salur) pelaksanaan TKD Otsus termin/tahap II bagi Kabupaten Manokwari. Fungsi SHEK yang dilaksanakan oleh BPP RI Perwakilan Papua Barat yaitu Evaluasi dan Koordinasi untuk memastikan Kabupaten Manokwari dapat memenuhi syarat salur TKD Tahap II dalam rangka pelaksanaan Otsus Papua. Hasil pertemuan tersebut, diantaranya:

- Pelaksanaan belanja daerah yang bersumber dari DOK yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari, diupayakan agar terus tertib administrasi dan harus tetap memperhatikan regulasi yang mengatur tentang perencanaan dan belanja. Sebagai misal, RAPPP dan PMK Nomor 33 Tahun 2024;
- Pemerintah Kabupaten Manokwari, akan berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi syarat salur sebagaimana regulasi yang ada, dan akan tetap melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Bappeda Provinsi Papua Barat, jika terdapat hal-hal yang membutuhkan dukungan dan koordinasi lebih lanjut..

CAPAIN KINERJA PEMBANGUNAN PAPUA CERDAS PAPUA BARAT, SAMPAI 2025

INDIKATOR KUNCI PILAR PAPUA CERDAS

Harapan Lama Sekolah (tahun)

▲ **13,17**

Baseline (2021): 13,21

Target (2041) : 14,59 – 16,61

Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)

▲ **7,86**

Baseline (2021): 7,84

Target (2041) : : 9,36 – 10,37

Sumber Data: RIPPP & BPS, 2025

KEGIATAN STRATEGIS LAINNYA

Dokumentasi Kegiatan Lainnya #03

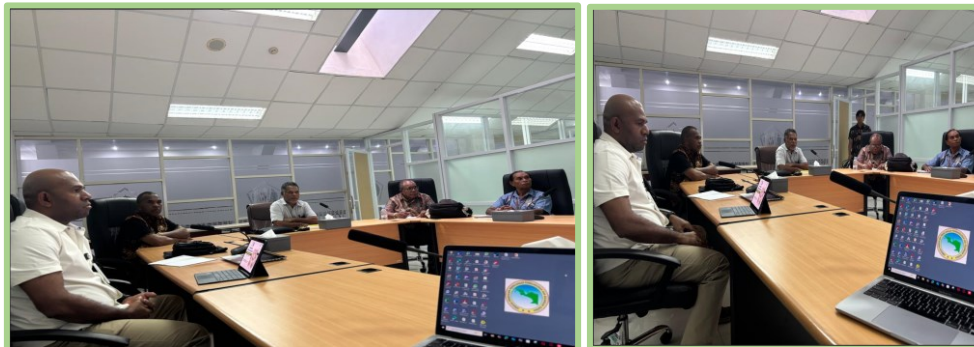


Photo: Pertemuan dengan Kepala Balai Besar KEMENSOS RI Region VI Jayapura (Bapak John Mampioer)

Manokwari, 31 Oktober 2025, bertempat di Ruang Kerja BPP RI Perwakilan Papua Barat Lt3 Gedung Keuangan Negara (GKN) Arfai, dilaksanakan pertemuan antara Kepala Balai Besar Kementerian Sosial Region VI Jayapura. Tujuannya, menyampaikan salah satu Program Strategis Nasional “Sekolah Rakyat”, dibawah koordinator Kementerian Sosial. Hasilnya, sampai dengan saat ini, tidak semua kabupaten di Papua Barat memperoleh kesempatan untuk mengimplementasikan “Sekolah Rakyat”, dikarenakan respon yang beragam dari tiap kabupaten, serta syarat yang belum sepenuhnya terpenuhi oleh tiap Kabupaten di Papua Barat. Oleh karenanya, disepakati beberapa hal untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut, diantaranya:

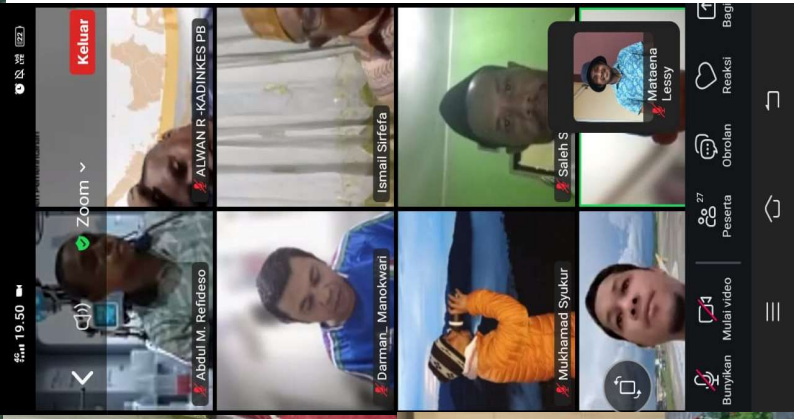
- BPP RI Perwakilan Papua Barat, dalam waktu dekat akan melakukan Rapat Koordinasi untuk menindaklanjuti hasil pertemuan. Tujuannya, memantapkan koordinasi dan konsolidasi daerah agar dapat merespon dan mengimplementasikan Program Sekolah Rakyat, sebagai salah satu upaya peningkatan mutu dan akselerasi akses terhadap Pendidikan di Papua Barat.
- BPP RI Perwakilan Papua Barat, akan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah kabupaten di Papua Barat, agar segera merespon Kebijakan Pemerintah Pusat melalui Program Sekolah Rakyat, untuk memastikan pendidikan yang adil dan inklusi bagi warga Papua Barat ..

Peserta Diskusi:

- BAPPEDA Provinsi Papua Barat
- BAPPEDA Kabupaten Manokwari
- BPP RI Perwakilan Papua Barat - POKJA Papua Cerdas



Terima Kasih



Laporan Pokja Papua Polhukam (Papua Damai)



DE OKTOBER 2025

Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Provinsi Papua Barat

Kegiatan-Kegiatan Strategis





PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas Berkat dan Perkenan-Nya sehingga laporan kerja bulanan Pokja Polhukam pada BP3OKP-RI Perwakilan Provinsi Papua Barat dapat disusun dan selesai sesuai waktu yang ditetapkan.

Laporan bulanan Pokja Polhukam Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggung jawaban atas pencapaian sasaran sinergi selama Bulan Oktober 2025

Laporan ini mendiskripsikan tentang tugas dan fungsi Pokja Papua Polhukam yang terakomodir dalam perencanaan strategis, visi-misi, tujuan dan sasaran kegiatan, kebijakan, program, termasuk permasalahan yang dihadapi dan upaya tindaklanjut pemecahan masalah.

Kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, maka sangat diharapkan adanya saran dan masukan bahkan kritik konstruktif untuk perbaikan laporan lebih lanjut.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semuateristimewa kami di jajaran Pokja dan Sekretariat BP3OKP serta setiap pembaca yang mulia.

Manokwari, Oktober 2025

Hormat Kami
Pokja Papua Polhukam

Dr. Ismail Sirfefa, S.Sos.,M.H



RINGKASAN EKSEKUTIF

Tugas dan fungsi Pokok BP3OKP adalah melakukan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) dengan Kementerian/Lembaga secara vertikal dari pusat sampai daerah termasuk distrik dan kampung. BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Barat berdasarkan Sistem Perencanaan Nasional dan Daerah berperan sebagai **Media Utama** untuk mengarahkan kebijakan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar sinergi dan serasi dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur dalam *Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004. Dalam pelaksanaan tugas BP3OKP untuk mengawal Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus di bidang Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif sesuai amanat Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP)* yang diatur dalam Perpres No 24 Tahun 2023, maka tugas Pokja Papua Polhukam selalu mendampingi dan berkoordinasi dengan Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif terutama mengenai bidang tugas dari ketiga pokja tersebut yang akan bersentuhan dengan masalah hukum dalam mhal ini regulasi daerah (*Perdatus dan Perdasi*), kondisi keamanan dalam pelaksanaan tugas ketiga pokja tersebut, terutama dari ketiga pokja dimaksud berkaitan dengan Pembentukan Kawasan Tentang Kiprah Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif.

Selama perjalanan pemerintahan dan pembangunan dalam Bulan Agustus Tahun 2025, Pokja Papua Polhukam hanya menitikberatkan pada bidang hukum dan pemerintahan, yaitu mensosialisasikan kebijakan Undang-Undang No 21 Tahun 2021 Pasal 47 tentang Pengawasan Sosial oleh masyarakat terhadap Pelaksanaan Otonomi Khusus, dan Peraturan Pemerintah No 107 Tahun 2021 Pasal 47 yang mengamankan Peran serta Masyarakat dalam Pengawasan Kebijakan Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus. Disisi lain Pokja Papua Polhukam juga terlibat di dalam setiap FGD yang dilakukan oleh pokja lainnya dan menjelaskan kepada pemerintah daerah melalui pimpinan OPD dan masyarakat tentang pentingnya sinergitas dan kerja sama Kementerian/Lembaga Non Kementerian seperti BPKP, BPK, KPK, Kejaksaan, Pemerintah Daerah/APIP, Ombudsman, DPRP/DPRK, Perguruan Tinggi Negeri dan masyarakat sebagai mitra kerja dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penerimaan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang dikoordinir oleh BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Barat

Output daripada kinerja Pokja Papua Polhukam (Papua Damai) Bersama pokja lainnya telah memberikan sumbangan yang berarti bagi peningkatan kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan masyarakat tentang tata cara penerimaan dan penggunaan dana Otsus. Disisi lain output yang dihasilkan Pokja Papua Polhukam terkait dengan penjelasan materi Bimtek tentang Sinergi Masyarakat dan BP3OKP dalam Pengawasan Dana Otonomi Khusus sangat dipahami oleh kelompok ASN, masyarakat, Dewan Adat, DPRK di beberapa kabupaten sehingga ekspresinya mencerminkan adanya pemahaman dan kepuasan terhadap materi yang disampaikan.

Demikian diskripsi ringkasan eksekutif (eksecutive summary) Pokja Papua Politik, Hukum dan Kemanan (Papua Damai) yang disampaikan untuk diketahui dan di mohon petunjuk lebih lanjut



Pendahuluan

Perpres No 121 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan dan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) terdiri dari 4 (empat) Pokja, yaitu Pokja Papua Sehat, Papua Cerdas Papua Produktif dan Papua Pohukam (Papua Damai). Keempat Pokja tersebut melaksanakan tugas dan fungsi pokok BP3OKP, yaitu Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Otonomi Khusus yang bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan antar daerah dan kesenjangan sektor demi terwujudnya orang Papua yang sejahtera dan mandiri. Untuk mencapai tujuan Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud, maka BP3POKP melalui kerja-kerja Pokja telah membangun koordinasi dan sinergitas dengan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dan setiap kabupaten di wilayah kerja Provinsi Papua Barat untuk bersama-sama mendorong proses percepatan pembangunan dan Pelaksanaan Otonomi Khusus sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan aturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 106 Tahun 2021 Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Peraturan Pemerintah No. 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Berdasarkan peraturan perundang undangan dimaksud maka BP3OKP telah melaksanakan fungsinya dan secara operasional dilakukan oleh setiap kelompok kerja (Pokja) dan melalui kesempatan ini Pokja Papua Polhukam akan menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan tugas Bulan Agustus untuk dijadikan data dan informasi kinerja pelaksanaan Poka Papua Politik, Hukum dan Keamanan untuk penmgambilan kebijakan lebih lanjut.



Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi BP3OKP didasarkan pada Perpres No. 121 Tahun 2022. Khusus untuk tugas pokok dan fungsi Pokja Papua Polhukam, dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Tugas

- Mendorong semangat Otonomi Khusus melalui pelaksanaan demokrasi yang berkeadilan, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap orang dalam pelaksanaan Otonomi Khusus;
- Bersinergi dengan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan **Desentralisasi Asimetris** untuk mewujudkan kekhasan daerah, karakteristik daerah dan kekhususan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan;
- Melaksanakan koordinasi dengan Lembaga terkait di bidang politik, hukum dan keamanan;
- Melaksanakan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelesaian pelanggaran Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta bersama aparat penegak hukum bersinergi dalam penyelesaian sengketa hukum baik dalam pemerintahan dan persengketaan yang berada dalam kehidupan masyarakat;
- Bekerja sama dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan dan suasana daerah yang kondusif;
- Melakukan pemantauan dan asesmen terhadap kinerja pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten dalam pelaksanaan Ttonomi Khusus;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Kawasan yang disiapkan oleh daerah dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Otonomi Khusus terkait dengan Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif;
- Mendukung dan mendorong harmonisasi sosial demi terwujudnya kebersamaan, harmoni dan toleransi dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan di daerah guna mendukung persatuan dan kesatuan nasional.

2. Fungsi

- Melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terhadap kebijakan program pelaksanaan Otonomi Khusus;

- Melaksanakan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga serta kelembagaan yang berada dalam masyarakat dalam rangka pembinaan dan pengawasan penggunaan dana Otsus bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola dana tersebut;
- Menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas Pokja Papua Polhukam kepada Pimpinan BP3OKP untuk diteruskan pada Presiden melalui Wakil Presiden.

3. Analisa Perkembangan Stratejik

Dalam pelaksanaan tugas, fungsi pokok Pokja Papua Polhukam, maka pencapaian kinerja yang diharapkan dapat dilakukan melalui analisis perkembangan strategi yang meliputi : bidang politik, hukum dan keamanan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Analisis Situasi Perkembangan Politik

Situasi dinamika perkembangan politik di daerah selama bulan Agustus untuk tujuh kabupaten dan provinsi masih berada pada posisi stabilitas politik yang dinamis mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat khsusnya Orang Asli Papua (AOP). Hal ini yang menjadi tuntutan masyarakat Orang asli Papua adalah pemerintah daerah segera melakukan program percepatan pembangunan Otonomi Khusus yang berpihak kepada hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP), melindungi hak masyarakat adat dan mewujudkan hakekat dan tujuan desentralisasi asimetris untuk kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).

Dalam analisis situasi perkembangan politik kekinian yang dilakukan oleh masyarakat dan mahasiswa di daerah merupakan wujud ekspresi merasa ketidakpuasan terhadap pemerintah bahkan justru terjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pemerintah daerah (*distrust public*) disebabkan karena pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota sangat lambat dan kurang anggap terhadap proses percepatan pembangunan Otonomi Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) sehingga berimplikasi terhadap masalah politik di daerah karena dinilai akan terjadi permasalahan sebagaimana yang dialami dalam pelaksanaan Otsus 20 tahun lalu di Tanah Papua.

Bahwa analisis indikasi kegagalan Otsus dapat diukur berdasarkan kondisi objektif bahwa semestinya pelaksanaan otsus 2021 sudah harus berjalan sebagaimana diharapkan, namun dalam tataran pelaksanaannya sampai saat ini tahun 2025 Otonomi Khusus belum dilakukan sebagaimana mestinya dan dinilai masih dalam tataran retorika politik dan stagnase karena perencanaan pembangunan daerah belum terlaksana sebagaimana diharapkan.

Untuk demokrasi politik yang berkembang di Manokwari Provinsi Papua Barat merupakan resonansi politik yang berkembang dari Kota Sorong terutama kegiatan politik yang dinilai makin perlu dilakukan tritmen untuk mendiagnosis akar permasalahan melalui pendekatan keamanan yang humanis (*humanis security approach*) dan pendekatan hukum yang berkeadilan.

b. Analisis Situasi Perkembangan Hukum

Dalam analisis situasi perkembangan hukum ditemukan bahwa kurangnya aparat penegak hukum dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan edukasi serta sosialisasi tentang kesadaran hukum (kadarukum) bagi seluruh elemen masyarakat termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dengan minimnya pembinaan dan edukasi serta sosialisasi hukum yang terbatas di kalangan masyarakat akar rumput (*grass root people*) membuat kesadaran masyarakat terhadap hukum sangat terbatas sehingga cenderung melakukan penyimpangan (*deviasi*) dan patologi sosial. Dalam konteks tersebut diharapkan adanya pembinaan secara kolaboratif antar aparat keamanan, aparat hukum, elemen masyarakat dan BP3OKP.

c. Analisis Situasi Perkembangan Keamanan

Beberapa langkah dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam prospektif keamanan masih bersifat temporer dan situasional. Semestinya ada forum dialog yang dilakukan pemerintah daerah untuk melibatkan forkopimda dalam dialog yang dijadwalkan secara periodik untuk membangun kesadaran masyarakat dibidang keamanan demi memperkuat ketahanan daerah yang merupakan bagian integral dalam ketahanan nasional demi terseleenggaranya proses pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Diharapkan pendekatan keamanan lebih bersifat humanis (*humanity security approach*) yang diwujudkan dalam pembinaan yang bersifat operasional seperti kegiatan Pendidikan, Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat agar ada rasa tanggung jawab masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan di lingkungan dan daerah secara kondusif dan berkelanjutan.

Rencana Strategik

Rencanan strategik pelaksanaan Otonomim Khusus yang diatur dalam RPJMD yang bersinergis dengan RPJMN merupakan strategi pembangunan daerah untuk mewujudkan orang Papua yang sehat, orang Papua yang pintar dan orang Papua yang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi melalui 3 program rencana strategis percepatan pembangunan Papua, yaitu : Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif yang secara strategi dilakukan oleh BP3OKP melalui Pokja Papua Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif serta Pokja Papua Polhukam.

Dalam konteks rencana strategik Pokja Papua Polhukam, adalah bersinergi dengan Pokja lainnya dalam pelaksanaan tugas yang kolaboratif dan koordinatif dalam rangka mewujudkan perdamaian yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat.

Kegiatan Pokja Papua Polhukam



Kegiatan silaturahmi tentang pembangunan keagamaan bersama Badan Koordinasi Majelis Muslim Papua terkait dengan kuota Haji bagi Orang Asli Papua (OAP), karena selama musim haji Orang Asli Papua yang beragama Islam tidak berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji disebabkan jatahnya terbatas dan mayoritas hanya diikuti oleh muslim nusantara.

Dalam konteks tersebut maka aspirasi Muslim Papua di Papua Barat melalui Badan Koordinasi Majelis Muslim Papua Provinsi Papua Barat sebagai wadah aspirasi umat Islam telah melakukan Koordinasi didampingi Pokja Papua Polhukam melakukan koordinasi Bersama Senator DPD-RI Abdullah Manaray, ST untuk memperjuangkan maksud tersebut kepada Menteri Agama/Kementerian Haji untuk menetapkan kuota Haji bagi Muslim Papua untuk setiap Kabupaten diberikan jatah 10 orang pada setiap musim haji. Aspirasi Muslim Papua di 6 (enam) kabupaten (Kabupaten Kaimana, Teluk Bintuni, Fakfak, Manokwari, Manokwari Selatan dan Kabupaten Teluk Wondama) telah diperjuangkan oleh BP3OKP Papua Barat dan rekomendasinya telah diserahkan kepada Ketua BP3OKP RI yang juga selaku Wakil Presiden Republik Indonesia untuk menerima dan menyetujui Badko MMP Provinsi Papua Barat



BP3OKP Papua Barat melalui Pokja Papua Polhukam berpartisipasi dengan Rektor Universitas Caritas Manokwari, Prof. Dr. Roberth Kr. Khammar, S.H.,M.Hum.,MM.,CLA. dan Wakil Ketua II DPR Provinsi Papua Barat, Samsudin Siknun, S.Sos,SH.,MH memberikan pencerahan terkait Revleksi 26 Tahun Provinsi Papua Barat : Pencapaian, Tantangan dan Arah Kebijakan menuju Indonesia Emas 2045 dalam webinar seri Iltopik yang disampaikan anggota Pokja BP3OKP RI Perwakilan Provinsi Papua Barat dengan topik utama Revleksi Ulang Tahun Provinsi Papua Barat: Pencapaian, Tantangan dan Arah Kebijakan Menuju Indonesia Emas 2045 Pada Tanggal 11 Oktober 2025 lebih mengarahkan tentang kebijakan paradigma baru pembangunan Otonomim Khusus melalui Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif untuk menuju Papua Barat yang sejahtera dan mandiri. Sedangkan topik yang diberikan pak Rektor Universitas Caritas Indonesia (UNCRI) yaitu “Tantangan dan Pendekatan Supremasi Hukum serta Peluang Investasi Ekonomi di Papua Barat” lebih diarahkan kepada Eksekutif melalui program legislasi dan legislatif melalui Badan Legilasi Provinsi Papua Barat untuk segera membuat Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Pertauran Daerah Provinsi (Perdasi) yang mengatur tentang penyelenggaraan perekonomian daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Topik Peran Aktif Legislatif terhadap pengawasan Pembangunan Papua Barat yag disampaikan Wakil Ketua DPRP Papua Barat mendapat tanggapan kritis dari masyarakat dan peserta webinar, bahwa idealnya DPRP sudah harus menyiapkan Perdasus tentang Pengawasan Sosial yang dilakukan masyarakat terhadap pembangunan Otonomi Khusus sebagaimana Amanah UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua pada Pasal 68, yang menyatakan Pengawasan Sosial terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus, namun selama 20 Tahun poerjalanan Otonomi Khusus sampai dengan saat ini belum ada produk hukum daerah yang mengatur tentang pengawasan sebagaimana Amanah UU tersebut.





Pada Tanggal 18 Oktober 2025 bertempat di Hotel Valdos. Harmonisasi Pembangunan Keagamaan untuk hidup rukun dan damai melalui Peran Badan Koordinasi Majelis Muslim Papua, dianatarnya Pokja Papua Polhukam BP3OKP menjelaskan tentang Peran Ormas Keagamaan sebagai Mitra Pemerintah dalam Menunjang Pelaksanaan Pembangunan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat, dan secara Internal Organisasi diharapkan Badko MMP Provinsi Papua Barat dapat melaksanakan audiens dengan BP3OKP/BPP Provinsi Papua Barat untuk mendapatkan masukan dan arahan BPP tentang program kerja yang menyangkut kondisi perlu dan keharusutamaan dengan tujuan agar semua kekuatan pemerintah daerah BP3OKP, masyarakat, dan Badko MMP sebagai bagian integral dari masyarakat sipil (Sivil Society) dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.





Minggu, 19 Oktober 2025 Menindaklanjuti Pelantikan Pelantikan dan Rapat Kerja Badan Koordinasi Majelis Muslim Papua (MMP) Provinsi Papua Barat menitipkan pesan melalui BP3OKP Cq. Pokja Papua Polhukam untuk membangun Komunikasi dengan Ketua Umum Majelis Muslim Papua Pusat melalui K.H. Ustd. Payage agar Kerukunan Hidup beragama di tanah Papua secara keseluruhan dapat diterapkan dengan penuh kebersamaan dan



Selasa, 04 Oktober 2025 bertempat di Aula Universitas Papua (UNIPA) Manokwari dilaksanakan Seminar Nasional yang betema : Satu abad peradaban Pendidikan bagi Orang Papua di Tanah Papua (nieuw Guinea) Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan. Sub Tema : Peradaban Baru Papua Memampukan Orang Papua Bangkit dan Memimpin Dirinya Sendiri Berdasarkan Sabda I.S Kijne. Kegiatan tersebut dalam rangka Peringatan Satu Abad Sabda I.S Kijne di Bukit Aitumeri Wondama, 25 Oktober 1925 dan Lustrum V Universitas Papua Manokwari, 03 November 2000.

Kesimpulan dari seminar tersebut diarahkan oleh Rektor Universitas Papua (UNIPA) Prof. Dr. Hugo Warami, S.Pd.,M.Hum dan beberapa Pendeta serta akademisi Universitas Papua maupun saran dari BP3OKP melalui Pokja Papua Polhukam agar peradaban kedua untuk membangun Pendidikan bagi Orang Asli Papua (OAP) harus dilakukan secara bersama-sama, berkoordinasi dengan organisasi atau Lembaga terkait termasuk lembaga pemerintah untuk mendukung program percepatan pembangunan Pendidikan di Tanah Papua. Hal tersebut didukung oleh Kepala Kementerian Agama Provinsi Papua Barat Bapak Mayor, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua Barat (Pdt. Simbyak) dan Pdt. Herman Dimara dan beberapa orang lainnya.



Kegiatan Strategis Bersama



Kegiatan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi (SHEK) Bersama Kamar Dagang Industri (Kadin) Provinsi Papua Barat untuk memperjuangkan Hak-hak Dasar Orang Asli Papua (OAP) di bidang ekonomi. Dalam pertemuan dimaksud diminta oleh Kadin Provinsi Papua Barat agar BP3OKP Papua Barat dapat memfasilitasi pertemuan Bersama Gubernur Papua Barat guna membicarakan hal-hal strategis, diantaranya 1) meminta kepada Gubernur Provinsi Papua Barat agar dapat membuat kebijakan afirmatif yang berpihak kepada kemudahan Orang Asli Papua (OAP) mendapat pekerjaan terutama pekerjaan konstruksi yang diberikan kepada Orang Asli Papua (OAP) Kepada Kadin Provinsi Papua Barat. 2) diharapkan oleh anggota (pengurus) Kadin Provinsi Papua Barat kiranya bapak gubernur dapat mengeluarkan regulasi yang mempermudah akses bagi OAP untuk mendapatkan pekerjaan.



Rapat Koordinasi Internal BP3OKP RI Papua Barat dan BP3OKP RI Papua Barat Daya (PBD). Dalam rapat koordinasi internal tersebut intinya membahas perbaikan kinerja baik menyangkut penganggaran, management Organisasi BP3OKP yang diatur dalam Kebijakan Tata Kelola BP3OKP. Selanjutnya memperbaiki sistem pelaporan BP3OKP setiap bulan serta merumuskan kerangka system pelaporan tahunan terutama menyangkut sistematika dan bentuk laporan itu sendiri.





Bertempat di Aula Kasuari Lantai III GKN manokwari Papua Barat, kegiatan SHEK Bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papuan Barat lebih mengarah pada dua bidang kegiatan, yaitu : 1) bidang kebudayaan dan 2) bidang pariwisata. Untuk bidang kebudayaan, platform dana yang disiapkan untuk pengembangan kebudayaan yang disiapkan pada setiap tahun anggaran sangatlah kecil. Hal ini disebabkan pembagian anggaran sesuai perencanaan bidang kebudayaan dan bidang kepariwisataan tidak dibagi berdasarkan Volume kerja yang proporsional dan berkeadilan sesuai kebutuhan masing-masing bidang, namun diatur berdasarkan kepentingan dan arogansi plt Kepala Dinas yang juga sebagai Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat. Perilaku seperti ini menyebabkan kurangnya dana pada bidang kebudayaan yang berimplikasi terhadap rendahnya budaya kerja organisasi Dinas tersebut. Disisi lain pegawai pada bidang Kebudayaan belum sepenuhnya belum melakukan inventarisasi dan identifikasi masalah kebudayaan di daerah yang akan dijadikan sebagai data dalam penyusunan program lebih lanjut.

Bidang kepariwisataan kondisi objektif menunjukan bahwa bidang tersebut belum sepenuhnya melakukan kegiatan Kepariwisataan di Provinsi dan Kabupaten, karena baik di provinsi maupun di kabupaten belum mempunyai Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten. Dalam konteks tersebut, maka Pokja Papua Polhukam BP3OKP menyarankan bahwa perlu adanya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata agar pelaksanaan pariwisata di daerah dapat berjalan dengan sempurna untuk meningkatkan nandanatan masyarakat dan Dandanatan Asli Daerah



Untuk melaksanakan fungsi SHEK BP3OKP berdasarkan undangan Biro Administrasi Dan Pelaksanaan Otonomi Khusus telah mengahadiri pelaksanaan FGD dengan judul Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan. Disarankan anggota Pokja Papua Polhukam agar kegiatan seperti ini harus menghadirkan semua instansi pemerintah daerah terutama pada Lembaga atau bidang terkait agar dapat bersama-sama melakukan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kinerja dari instansi yang menyelenggarakan Pendidikan di daerah. BP3OKP melalui Pokja Papua Polhukam menyarankan agar penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi Papua Barat harus diatur didalam produk hukum daerah dalam hal ini Perdas tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi Papua Barat.





Kegiatan-Kegiatan Strategis



sesuai misi percepatan per...

Beberapa

1. T-



4. Mengharapkan Pendidikan sebagai wujud peradaban terlaksana dengan baikdi seluruh wilayah provinsi Papua Barat terutama didaerahdaerah terpencil, terjauh dan terluar agar harkat dan martabatnya sama karena mereka memahami tentang apa arti peradaban di bidang Pendidikan
5. Pertemuan bersama Kadin Provinsi Papua Barat masih merupakan pertemuan awal dengan haraoan adanya tindak lanjut yang difasilitasi oleh BP3OKP Papua Barat agar terwujudnya pertemuan segitiga antar Kadin, BP3OKP dan Gubernur Provinsi Papua Barat untuk merealisasi program kerja Kadin Provinsi Papua Barat.
6. Diharapkan terwujudnya atau tercapainya system pelaporan yang paten agar setiap pembuatan laporan tidak bervariasi dan Panjang, namun laporan yang obyektif, transaparan dan akuntabel.
7. Pencapaian yang diperoleh dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bersama BP3OKP adalah terciptanya kesepakatan untuk mengider''fikasi dan menginfentarisir benda-benda budaya sebagai objek dalam rangka pengembangan pariwisata di provinsi dan kabupaten.
8. Adanya saran perbaikan kelak agar Tata Kelola dapat diperbaiki melalui perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan Otonomi Khusus'' hingga penyelenggaraan Pendidikan dengan menggunakan dana Otsus dapat berjalan secara efisien dan efektif.



Kegiatan-Kegiatan Strategis





REKOMENDASI UMUM

Rekomendasi umu berdasarkan capaian antara lain, yaitu Dari 8 jenis item laporan yang disampaikan antara lain : Pembangunan keagamaan, FGD HUT Provinsi Papua Barat ke 26 Tahun, Pendampingan Badko MMP Papua Barat, Seminar Nasional Peradaban Orang Papua, Pelaksanaan SHEK Bersama Kadin Provinsi Papua Barat, Rapat Internal BP3OKP Papua Barat dan BP3OKP Papua Barat Daya, FGD Biro Administrasi dan Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua, Pertemuan dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat maka disarankan/direkomendasikan hal, hal sebagai berikut : 1. Disarankan agar Pemerintah dengan Pemerintah Prov. Papua Barat yang diinisiasi oleh Gubernur Papua Barat dapat mendorong rencana pembangunan keagamaan yang diperjuangkan oleh Pokja Agama MRP PB dan BP3OKP-RI Papua Barat dapat direalisasi bantuan pembiayaan untuk pembentukan Peraturan Daerah provinsi tentang pembangunan keagamaan. 2. Disarankan kepada Pemerintah Prov. Papua Barat bahwa prestasi dan kinerja pemerintah yang telah dicapai dapat ditingkatkan dan hasil evaluasi yang mencantumkan rendahnya tingkat pencapaian agar dapat diperbaiki secara bertahap, berebencana dan berkelanjutan. 3. Disarankan materi yang diperoleh dari pendamping atau mediator BP3OKP cq. Pokja Papua Polhukam dapat dipelajari dan dipahami guna pengembangan organisasi Badko MMP kedepan 4. Disarankan agar seminar Peradaban Pendidikan di Tanah Papua dapat dilakukan tepatnya pada tanggal 25 Oktober setiap tahun 5. Disarankan agar Kadin Papua Barat Bersama BP3OKP dapat melakukan audiens dengan Gubernur Papuan Barat untuk membicarakan apa yang menjadi tujuan Kadin Prov. Papua Barat 6. Disarankan agar format sistematika yang telah disusun dapat didistribusikan kepada anggota BP3OKP dan anggota Pokja 7. Disarankan Biro Otsus dapat memperbaiki Tata Kerja agar semua bagian dapat melaksanakan tugas dan fungsi sesuai peraturan Perundang-Undangan guna menghindari tumpang tindih antara tugas Biro Otsus dan Dinas Pendidikan dalam menangani penyelenggaraan Pendidikan di Papua Barat 8. Disarankan agar adanya Penambahan Platform dana pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terutama pada bidang Pariwisata yang selama ini platform anggarannya rendah/sedikit.
--



Kegiatan-Kegiatan Strategis

Demikian penyampaian Laporan bulanan untuk Bulan Oktober 2025 Pokja Papua Polhukam pada BP3OKP-R Perwakilan Provinsi Papua Barat untuk diketahui dengan harapan adanya respon, petunjuk dan kebijakan lebih lanjut guna pengembangan tugas dan fungsi Pokja Papua Polhukam yang lebih baik serta berimplikasi terhadap program Papua Damai khususnya di Provinsi Papua Barat yang bermartabat, berkeadilan, dan berkelanjutan.



LAPORAN BULANAN

POKJA PAPUA PRODUKTIF



PERIODE OKTOBER 2025

KEGIATAN – KEGIATAN STRATEGIS



Indikator Pembangunan Papua Produktif

Tingkat Kemiskinan

20,66%

Baseline (2022): 21,33
Target (2024): 19,03



TPT

4,85%

Baseline (2022): 5,37



Realisasi Investasi

Rp 14,52 Triliun

Baseline (2021): Rp919,07 M



Audiensi yang di laksanakan BP3OKP-PB dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Papua Barat pada Kamis, Oktober 2025 bertempat di Gedung Keuangan Negara Lt.III, Arfai, Manokwari. Pertemuan ini bertujuan untuk menjalin kerja sama antara KADIN dan BP3OKP dalam percepatan pembangunan di Papua Barat.

BP3OKP dan KADIN berupaya meningkatkan sinergi dalam pembangunan di Provinsi Papua Barat, khususnya melalui Kelompok Kerja (POKJA) Papua Produktif yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi lokal. POKJA ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing ekonomi lokal, dengan menekankan partisipasi masyarakat asli Papua dalam UMKM serta pemanfaatan potensi daerah. KADIN, sebagai wadah besar bagi para pengusaha dan asosiasi di daerah, diharapkan dapat berkolaborasi dengan BP3OKP untuk memastikan program pembangunan berjalan efektif, terutama dalam menyusun perencanaan dan penganggaran.

Pembicaraan juga menyoroti tantangan signifikan seperti tingkat kemiskinan yang tinggi, pengangguran terbuka, dan kesulitan investasi di Papua Barat, yang diakibatkan oleh masalah keamanan dan tingginya biaya sosial. KADIN mengidentifikasi perlunya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat adat mengenai kontrak lahan dan pengembangan usaha, serta mendesak pemerintah daerah untuk lebih mengakui peran KADIN dalam pembangunan ekonomi. Sinergi antara pemerintah dan organisasi seperti KADIN dianggap krusial untuk mengatasi masalah-masalah ini dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Beberapa usulan strategis dari KADIN dan BP3OKP meliputi perluasan bidang usaha berbasis komoditas unggulan seperti kopi dan coklat, peningkatan kapasitas pengusaha melalui pelatihan dan pendampingan, serta pengembangan produk-produk inovatif seperti tepung ikan. Selain itu, ditekankan pentingnya keterlibatan KADIN dalam setiap tahap perencanaan pembangunan daerah, mulai dari musrenbang tingkat bawah hingga tingkat provinsi, untuk memastikan anggaran dialokasikan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya orang asli Papua.

Indikator Pembangunan Papua Produktif

Tingkat Kemiskinan

20,66%

Baseline (2022): 21,33
Target (2024): 19,03



TPT

4,85%

Baseline (2022): 5,37



Realisasi Investasi

Rp 14,52 Triliun

Baseline (2021): Rp919,07 M



Edukasi dan Pendampingan

- Penting untuk memberikan edukasi, sosialisasi, dan pendampingan kepada masyarakat terkait masalah pertanahan dan tanah adat.
- ❖ Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa hak ulayat bisa dikontrakkan, bukan hanya dijual.
- ❖ Edukasi ini akan membantu masyarakat memahami hukum bisnis dan etika bisnis.
- Mendorong masyarakat untuk tidak hanya bergantung pada proyek pemerintah.
- ❖ Mampu berbisnis dan mengembangkan usaha lain di luar konstruksi.
- ❖ Membangun budaya yang tidak hanya bergantung pada proyek, melainkan juga berinovasi.

Kesimpulan

Pentingnya Kolaborasi yang Efektif

- ❖ Pertemuan ini menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara KADIN dan BP3OKP untuk percepatan pembangunan di Papua.
- ✓ KADIN memiliki peran strategis dalam menghimpun dan membina pengusaha lokal, sementara BP3OKP fokus pada pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- ✓ Kolaborasi ini harus menyentuh berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga infrastruktur.
- ❖ Tantangan besar seperti kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya investasi harus diatasi dengan pendekatan yang komprehensif.
- ✓ Perlunya edukasi dan pendampingan bagi masyarakat asli Papua dalam mengembangkan usaha dan memahami hak-hak adat mereka.
- ✓ Dukungan terhadap asosiasi pengusaha dan organisasi adat sangat krusial untuk menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif.

BP3OKP-PB DAN KADIN-PB

Rekomendasi dan Tindak Lanjut

1. BP3OKP akan memperdalam data dan analisa untuk bimbingan pejabat di wilayah Papua.
2. KADIN dan BP3OKP akan mendorong pemerintah daerah untuk mengenali dan bekerja sama dengan KADIN.
3. Mengembangkan program kesehatan bergerak dan sistem pelayanan kesehatan yang lebih sesuai untuk OAP.
4. Mendorong diversifikasi usaha dari sektor konstruksi ke sektor lain yang memiliki potensi di Papua.
5. BP3OKP akan menyajikan paparan resmi mengenai Pokja Papua Produktif kepada KADIN.
6. KADIN dan BP3OKP akan menjadwalkan diskusi lebih lanjut tentang perluasan bidang usaha dan akses ke lembaga keuangan.
7. Mengadakan pelatihan manajemen bisnis dan pengembangan teknis bagi pengusaha lokal.
8. Membangun sinergi dengan asosiasi seperti GAPENSI dan KAP untuk pemberdayaan pelaku usaha OAP.
9. Memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat adat mengenai pengelolaan hak ulayat.

Indikator Pembangunan Papua Produktif

Tingkat Kemiskinan

20,66%

Baseline (2022): 21,33
Target (2024): 19,03



TPT

4,85%

Baseline (2022): 5,37



Realisasi Investasi

Rp 14,52 Triliun

Baseline (2021): Rp919,07 M



POKJA PAPUA PRODUKTIF DAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN BINTUNI

Hari Senin 20 Oktober 2025 Anggota Pokja Papua Produktif melakukan kunjungan kerja dalam rangka Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi ke Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung di Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam kunjungan tersebut di hadiri oleh **Apolos Orocomna** selaku sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, **Lalu Suprpta** (Anggota Pokja Papua Produktif), **Ismail Sirfefa** (Anggota Pokja Polhukam, **Jhon Maninuy** (Tokoh Masyarakat).



Beberapa program-program yang menjadi fokus dalam pertemuan adalah program program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang sudah diusulkan dalam musrembang, Program-Program Sudah Dikerjakan, Apa Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi dan Perencanaan Untuk Tahun 2026.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Teluk Bintuni dalam melaksanakan program berfokus kepada dana yang bersumber dari Dana Desa/Kampung dan Dana Otsus.

1. Untuk Dana Otsus kita focus pada kegiatan pelatihan inovasi-inovasi yang berada di 24 Distrik di Kabupaten Bintuni.
 - Pelatihan dan pengembangan Pembuatan beras dari bahan dasar sagu. Inovasi inovasi ini selalu kami laksanakan.
 - Pelatihan dan pengembangan kue dari bahan dasar singkong, Petatas, keladi
 - Pabrik pengalengan ikan (Bio Bintuni), yang di programkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung namun secara teknis dan pengelolaan, hingga manajemen administrasi dikelola oleh UMKM. Pabrik tersebut Sementara belum berjalan/sedang menunggu izin.
 - Pabrik Sagu Arandai yang di bangun tahun 2024. Pabrik Sagu Arandai bekerjasama dengan ITB Bogor dan Bandung. Peralatan dan Mesin produksi sudah ada, hanya menunggu progresnya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Teluk Bintuni berharap ditahun 2026 sudah beroperasi.
 - Pengembangan inovasi minyak dari bahan local buah merah. Khusus di Bintuni penjualan minyak buah merah, Gen yang isi 5 liter harganya mencapai 1 juta.

Indikator Pembangunan Papua Produktif

Tingkat Kemiskinan

20,66%

Baseline (2022): 21,33
Target (2024): 19,03



TPT

4,85%

Baseline (2022): 5,37



Realisasi Investasi

Rp 14,52 Triliun

Baseline (2021): Rp919,07 M



CAPAIAN

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung melakukan pelatihan, pembinaan dan sosialisasi kepada Masyarakat OAP di 115 kampung yang tersebar di Kabupaten Teluk Bintuni kurang lebih 1 tahun 3 kali kegiatan.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung melakukan pembinaan dan pelatihan-pelatihan di tingkat kampung Tingkat pengawasannya oleh Institusi Hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) dan Institusi Pemerintah (Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung).

REKOMENDASI

- Diharapkan ada kolaborasi/Kerjasama untuk bagaimana memberikan edukasi sesuai dengan substansi, misalnya pemberdayaan Masyarakat di kampung berupa pembinaan/pelatihan, pengelolaan dan manajemen pemasaran.
- Untuk kesejahteraan dan menjadi sumber pendapatan Orang Asli Papua di Bintuni perlu dikembangkan beberapa bahan bahan local seperti pembuatan beras dari sagu, pembuatan kue dari bahan dasar sinkong dan patatas serta minyak dari bahan dasar buah merah.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Teluk Bintuni berupaya mempercepat proses perijinan Pabrik pengalengan ikan sehingga dapat membantu Masyarakat nelayan dalam menampung hasil tangkapan.

Indikator Pembangunan Papua Produktif

Tingkat Kemiskinan

20,66%

Baseline (2022): 21,33
Target (2024): 19,03



TPT

4,85%

Baseline (2022): 5,37



Realisasi Investasi

Rp 14,52 Triliun

Baseline (2021): Rp919,07 M



POKJA PAPUA PRODUKTIF DAN BAPPELITBANGDA KABUPATEN BINTUNI

ANGGOTA POKJA PAPUA PRODUKTIF melakukan kegiatan kunjungan kerja dalam rangka SHEK ke BAPPELITBANGDA Kabupaten Teluk Bintuni pada Senin 20 Oktober 2025, bertempat di Ruang Rapat BAPPELITBAGDA Kab. Bintuni.



Gambaran umum dana otsus Kabupaten Bintuni

Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni masih berada pada penyaluran tahap 1 karena ada kewajiban untuk memenuhi syarat salur, sementara Pemda Kabupaten Teluk Bintuni tidak dapat memenuhi kewajiban syarat salur lebih cepat sehingga memperlambat penyaluran tahap 2.

Permasalahan/Kendala

1. Penyaluran dana otsus tahap 2 mengalami Keterlambatan dikarenakan kerja-kerja OPD. Karena semakin cepat OPD bekerja maka semakin cepat juga penyaluran tahap 2.
2. Terjadinya Transisi kepemimpinan. Pemimpin/Pejabat baru menggantikan OPD-OPD dan beberapa staf menyebabkan kinerja menjadi pasif.
3. Serapan anggaran masih rendah belum mencapai 50%. Penyerapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum baru mencapai 7 % dikarena transisi pergantian kepala Dinas PU sehingga merombak/mengantikan beberapa staf lama dengan staf yg baru.
4. 10 % DBH Migas Otsus (40 milyar) jumlah dana cukup besar tetapi pilihan penggunaan anggaran terbatas sehingga pemanfaatan anggaran kurang maksimal. Dan 10% tidak di peruntukan untuk Pekerjaan fisik tetapi hanya untuk pemberdayaan Masyarakat.

Tindak Lanjut

- Tuntutan masyarakat adat Sebiar 10% DBH Migas Otsus di berikan kepada pemilik hak Adat. Tuntutan tersebut akan di sampaikan kepada Gubernur Provinsi Papua Barat sebagai pertimbangan.
- Program bapak Bupati sangat mendukung dan selaras dengan beberapa program yang berkaitan dengan program papua sehat, papua produktif dan papua cerdas.

Rekomendasi

1. Gubernur Papua Barat dapat mempertimbang tuntutan masyarakat adat Sebiar selaku pemilik wilayah migas.
2. Perlu pembukaan slot penggunaan anggaran DBH Migas 10% sehingga tidak berfokus kepada pemberdayaan Masyarakat saja tetapi pemberdayaan-pemberdayaan yang lain, sehingga penggunaan anggaran boleh terpakai maksimal.

Indikator Pembangunan Papua Produktif

Tingkat Kemiskinan

20,66%

Baseline (2022): 21,33
Target (2024): 19,03



TPT

4,85%

Baseline (2022): 5,37



Realisasi Investasi

Rp 14,52 Triliun

Baseline (2021): Rp919,07 M



POKJA PAPUA PRODUKTIF DAN DISNAKER KABUPATEN BINTUNI

Anggota Pokja Papua Produktif melakukan kunjungan dalam rangka SHEK ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bintuni pada hari Selasa 21 Oktober 2025, bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja Bintuni.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Teluk Bintuni berupaya menyiapkan kompetensi tenaga kerja yang merupakan anak-anak asli papua berdasarkan Kebutuhan di Lapangan. Disnaker Kabupaten Teluk Bintuni tidak mendapatkan dana otsus dan bahkan perencanaan indikatif untuk tahun 2026 mungkin tidak ada. Sumber dana yang kami gunakan Adalah DBH Migas.

Indicator untuk penyerapan tenaga kerja adalah mengurangi angka pengangguran, pertembuhan perekonomian, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Program Prioritas

- Salah satu Program unggulan Disnaker Kabupaten Teluk Bintuni Adalah *vokasi treaning*. *Vokasi treaning* merupakan program yang membantu mengasah keterampilan praktis yang langsung diterapkan di dunia kerja. Fokus utamanya memberikan keahlian teknis yang sangat dibutuhkan di berbagai sektor industri, sehingga bisa lebih siap bersaing di pasar kerja. Yang kami mencoba untuk membenahi yaitu peningkatan sumber daya manusia (SDM) secara khusus Anak-Anak Asli Papua tetapi juga yang lahir dan besar di papua dengan cara *vokasi treaning*.
- Penyiapan Sumber daya manusia untuk bidang penempatan terhadap tenaga kerja.
- Menyediakan tenaga kerja yang berkompetensi bagi industri-industri ini dan mendorong adanya perubahan sosial dan ekonomi di Bintuni

Indikator Pembangunan Papua Produktif

Tingkat Kemiskinan

20,66%

Baseline (2022): 21,33
Target (2024): 19,03



TPT

4,85%

Baseline (2022): 5,37



Realisasi Investasi

Rp 14,52 Triliun

Baseline (2021): Rp919,07 M



Kendala dan Permasalahan

- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Teluk Bintuni memiliki program-program prioritas yang sangat berperan dalam peningkatan kompetensi anak-anak papua, mengurangi angka pengangguran, meningkatkan ekonomi rakyat, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah namun dengan keterbatasan dana yang bersumber hanya pada DBH migas tidak cukup dan untuk dana otsus Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Teluk Bintuni tidak mendapatkan.
- ROYEK LNG BP TANGGUH berada di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat yang merupakan kewenangan Kabupaten Bintuni. Namun Kota sorong masih mendapatkan keuntungan di karenakan belum ada revisi Amdal.

POKJA PAPUA PRODUKTIF DAN DISNAKER KABUPATEN BINTUNI

CAPAIAN

- Disnaker Kabupaten Teluk Bintuni sedang berupaya memfasilitasi anak-anak asli Papua yang tidak memiliki sertifikasi di biyai.
- Penyusunan rencana kerja anggaran dan Renja berdasarkan hasil meping dan metrics renja dan kemudian sudah masuk dalam RPJMD 5 berjalan.

REKOMENDASI

1. Perlu revisi Amdal **Proyek LNG BP TANGGUH** untuk meproteksi batas-batas wilayah karena Kota sorong masih mendapatkan keuntungan, yang seharus kota sorong sudah tidak masuk dalam wilayah provinsi papua Barat. Perlu regulasi undang-undang untuk memproteksi hak hak yang menjadi kewenangan Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Pembagian Dana Otsus ke Dinas Dinas di kabupaten Teluk Bintuni perlu memperhatikan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi karena mempunyai peran sangat penting.

Indikator Pembangunan Papua Produktif

Tingkat Kemiskinan

20,66%

Baseline (2022): 21,33
Target (2024): 19,03



TPT

4,85%

Baseline (2022): 5,37



Realisasi Investasi

Rp 14,52 Triliun

Baseline (2021): Rp919,07 M



BP3OKP PAPUA BARAT DAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI PAPUA BARAT

Audiensi yang di gelar pada Selasa, 28 Oktober 2025 di Gedung Keuangan Negara Lt.3 manokwari, antara BP3OKP Papua Barat dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat, dalam rangka Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi terkait program-program di sector kebudayaan dan pariwisata di Provinsi Papua Barat

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat, tengah mendorong setiap Kabupaten untuk memiliki festival khas daerah masing-masing. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan memperkenalkan kekayaan budaya di daerah ini. Pelaksanaan tugas (Plt) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat, mengatakan bahwa festival-festival ini akan menjadi ajang promosi yang efektif untuk menarik minat wisatawan baik domestik maupun mancanegara. “Selain sebagai ajang promosi, festival-festival ini juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat melalui sektor pariwisata” Beberapa contoh festival yang telah sukses digelar adalah Festival Teluk Doreh di Manokwari, Festival Pesona Senja di Kaimana, dan Festival Pesona Pala di Fakfak.

Tak hanya festival khas daerah, tapi destinasi unggulan juga harus di ciptakan masing-masing daerah sebagai daya tarik. Kegiatan bertaraf Nasional dan Internasional juga sudah beberapa kali dilakukan dan akan menjadi rutin tiap tahunnya. “Even-even tersebut seperti wisata religi di Pulau Mansinam Manokwari, peringatan 100 tahun peradaban di Aitumeri di Wondama. Juga wisata pada kegiatan surfing nasional Manokwari provinsi Papua Barat sudah menjadi even rutinitas di Provinsi Papua Barat,”

Beberapa ditargetkan masuk dalam kalender event nasional. Dengan begitu, secara otomatis ada intervensi dari pemerintah pusat untuk meningkatkan infrastruktur pariwisata Papua Barat. “Ini beberapa even yang kita harapkan, dan kita juga berharap dari kabupaten lainnya. Seperti di Mansel dengan Potensi Coklat, hanya saja dari pemerintah kabupaten belum bisa mengemas itu ke dalam event.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat, mempertegas

Peta Pembagian KSPP berdasarkan koridor pariwisata di Provinsi Papua Barat:

1. KSPP geowisata Pegaf adalah Manokwari-Mansel koridor pariwisatanya Manokwari Selatan, Teluk Wondama
2. KSPP ekowisata bahari Teluk Wondama dan Kaimana koridor pariwisatanya Fakfak, Kaimana.
3. KSPP pariwisata budaya Fakfak koridor pariwisatanya Teluk Bintuni dan Fakfak.

Rangkaian penyusunan document ini dari rewiuw sampai pada revisi adalah dengan melibatkan para kepala Dinas atau Dinas terkait di setiap kabupaten/kota untuk bersama-sama menentukan setiap KSPP tetapi juga koridor dalam rangka pembangunan pariwisata di Papua Barat. Dalam Dokumen KSPP yang di kaji dan di tetapkan dalam document Rencana Induk Pembangunan Pariwisata kami menetapkan Kabupaten Manokwari sebagai HAP (Primer) dan HAP (Sekunder) atau Pintu masuk penyebaran wisatawan.

Penentuan Kabupaten Manokwari sebagai HAP (Primer) terkait fasilitas-fasilitas, sarana prasarana, letak strategis, geografis. Dan HAP (Sekunder) berada di daerah selatan Kabupaten Fakfak. tujuan pembagian HAP pada 2 wilayah adalah agar mengurangi estimasi biaya yang di keluarkan oleh wisatawan, mengurangi jarak dan waktu wisatawan ke tempat wisata atau wisatawan dapat memilih HAP berdasarkan jarak ke tempat wisata.

Indikator Pembangunan Papua Produktif

Tingkat Kemiskinan

20,66%

Baseline (2022): 21,33
Target (2024): 19,03



TPT

4,85%

Baseline (2022): 5,37



Realisasi Investasi

Rp 14,52 Triliun

Baseline (2021): Rp919,07 M



Implementasi Program Kebudayaan

- Fasilitasi kegiatan festival budaya dan kesenian daerah
- Pendataan, pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)
- Revitalisasi, rumah adat, benda cagar budaya (penetapan dan pemberdayaan tenaga juru pelihara) dan situs sejarah
- Pembinaan sanggar dan pelaku ekonomi kreatif

Implementasi Program Kepariwisataan

- Pengembangan destinasi unggulan Manokwari, Fakfak, Kaimana, Teluk Wondama.
- Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan pemandu, pengelolaan Homestay dan kuliner local
- Pengembangan desa wisata berbasis masyarakat dan kearifan lokal
- Penguatan jejaring kerjasama dengan pelaku usaha dan komunitas wisata

BP3OKP PAPUA BARAT DAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI PAPUA BARAT

CAPAIAN PROGRAM

- Terlaksananya 25 kegiatan kebudayaan dan pariwisata tingkat Provinsi dan Kabupaten
- Penetapan WBTB dan cagar budaya
- Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestic dan mancanegara
- Terbentuknya 10 Desa wisata berbasis masyarakat
- Peningkatan kompetensidan sertifikasi SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata Provinsi Papua Barat
- Peningkatan promosi destinasi unggulan Papua Barat di tingkat nasional.

REKOMENDASI

1. 305 miliar telah di anggarkan oleh kementerian namun belum ada realisasinya
2. Mengenai Rencana Induk Pariwisata Papua Barat, terkait penambahan anggaran, akan di perkuat pada kegiatan musrenbang, tidak di forum ini. Namun BP3OKP akan memberikan rekomendasi
3. Pembagian anggaran ke bidang-bidang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat di sesuaikan kondisi dan kebutuhan Spesifik masing masing bidang.
4. Dari 4 bidang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi papua Barat, bekerja lebih giat untuk membuat program yang konkrit yang betul menjawab persoalan.



Rapat Bulanan BPP Papua Barat & Papua Barat Daya

Kamis, 09 Oktober 2025, bertempat di Aula Kasuari Lt. III Gedung Keuangan Negara, Arfai-Manokwari BPP Papua Barat dan Papua Barat Daya melakukan Rapat Bulanan terkait kelembagaan BPP dan pengelolaan anggaran

HASIL DISKUSI DAN REKOMENDASI

Peningkatan Kapasitas Pokja

Diperlukan peningkatan kapasitas bagi Pokja, termasuk pelatihan dan pemahaman mengenai peraturan perencanaan seperti RIP3. Pokja harus berani menegur pemerintah daerah jika ada perencanaan anggaran yang tidak tepat atau berulang.

Perjalanan Dinas dan Pengelolaan Keuangan

Kementerian Keuangan tidak memiliki anggaran untuk perjalanan dinas ke hotel bagi pegawainya, sehingga harus menggunakan fasilitas pemerintahan atau mencari alternatif yang efisien. Perjalanan dinas dalam kota memiliki anggaran terbatas (Rp 9 juta), sehingga perlu selektivitas dan undangan resmi dari stakeholder untuk kegiatan. Transport lokal untuk masyarakat yang diundang dalam kegiatan dapat menggunakan mekanisme pelaksanaan anggaran yang melibatkan masyarakat, seperti transport lokal non-ASN.

Penguatan Kelembagaan BPP

Pentingnya penguatan kelembagaan BPP agar memiliki wibawa dan mampu mengawal implementasi kebijakan otonomi khusus. BPP perlu memiliki auditor sendiri untuk mengaudit program-program yang berjalan di daerah. Pembentukan Sekretariat BPP yang mandiri sangat penting agar tidak bergantung pada instansi lain.

Pengelolaan Dana dan Lingkungan Kerja

Diskusi mengenai pengelolaan dana desa dan masalah pengadaan barang untuk kegiatan sosial di lapangan menunjukkan perlunya SOP yang seragam. Masalah ruang kerja yang terbatas bagi BPP Papua Barat Daya menjadi kendala, karena seringkali harus meminjam ruangan dan jadwal terbentur dengan kegiatan lain.

Mekanisme Evaluasi

Perlunya mekanisme evaluasi yang jelas dan terukur untuk menilai efektivitas program otonomi khusus. Evaluasi berbasis output dan outcome sangat penting untuk memastikan dana otonomi khusus benar-benar berdampak pada masyarakat.

laborasi dengan Universitas

Diusulkan kolaborasi dengan universitas Negeri Papua (UNIPA) untuk kajian dan penelitian, khususnya terkait kesejahteraan desa. Kementerian Keuangan sedang mempertimbangkan pembentukan lembaga riset kajian ekonomi dan fiskal di setiap daerah yang bekerja sama dengan universitas.

Kritik terhadap Komite Eksekutif

Adanya Komite Eksekutif yang baru dibentuk menimbulkan pertanyaan mengenai fungsinya. Komite ini harus memberikan dukungan kepada BPP dan tidak mengambil alih peran BPP.



GAMBARAN UMUM

Situs Aitumeri di Distrik Wasior, Teluk Wondama, menjadi saksi sejarah perjalanan 100 tahun nubuatan yang menandai lahirnya kesadaran pendidikan formal bagi Orang Asli Papua (OAP). Momen bersejarah ini sekaligus menjadi refleksi atas warisan besar Domine Izaak Samuel Kijne (1899–1970), misionaris asal Belanda yang berjasa meletakkan dasar pendidikan, iman, dan peradaban bagi masyarakat Papua. Puncak acara diwarnai dengan penghayatan terhadap pesan nubuatan yang disampaikan I.S. Kijne tepat seabad lalu di Wasior, pada 25 Oktober 1925. Nubuatan itu kini menjadi sumber inspirasi bagi kebangkitan generasi Papua: *“Di atas batu ini, saya meletakkan peradaban orang Papua. Sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi dan ma’rifat, tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri.”*

Perayaan 1 Abad Nubuatan I.S. Kijne bukan hanya sekadar peringatan sejarah, tetapi juga menjadi panggilan moral bagi seluruh masyarakat Papua untuk terus bersatu, bangkit, dan membangun peradaban dengan berlandaskan iman, pengetahuan, serta kearifan local.

PERAYAAN SATU ABAD I.S. KEYNNE DAN PELETAKAN BATU PERTAMA PEMBANGUNAN BANDARA I.S. KEYNE WONDAMA

Hari Sabtu 25 Oktober 2025, bertempat di Aitumeri, Wasior, Kabupaten Teluk Wondama Anggota Pokja Papua Produktif, **Lalu Suprpta, Viktor Towansiba, Stap** menghadiri perayaan 1 abad atau 100 tahun Peradaban orang papua/100 tahun orang papua baca-tulis. Perayaan 1 Abad Peradaban di Tanah Papua ini dihadiri ribuan jemaat dari berbagai denominasi gereja di Tanah Papua. Turut hadir Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, para tokoh lintas gereja, pejabat pemerintah provinsi dan kabupaten se-Tanah Papua, unsur Forkopimda, serta sejumlah tamu kehormatan dari berbagai kalangan. Perayaan yang diikuti oleh 15 ribu orang itu berlangsung meriah. Hadir juga Gubernur beserta Wakil Gubernur Papua Barat, Gubernur Papua Barat Daya, Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama, serta jajaran Forkopimda dan tokoh-tokoh agama. Suasana perayaan semakin semarak dengan beragam penampilan budaya khas Papua, termasuk tarian adat dari tujuh wilayah adat, pelepasan burung merpati, serta balon ke udara sebagai simbol perdamaian dan persaudaraan antarumat.

KESIMPULAN

1. Momen Refleksi Sejarah

- Mengingat kembali kedatangan Injil dan nubuatan Isak Samuel Kijne di Aitumeri pada 25 Oktober 1925.
- Menjelaskan bagaimana Injil membawa perubahan fundamental, membuka jalan bagi pendidikan, kesehatan, dan peradaban baru bagi orang asli Papua (OAP).
- Mengapresiasi perjuangan para misionaris dan leluhur yang telah menerima dan memelihara iman tersebut.

2. Merayakan Kebangkitan Sumber Daya Manusia (SDM) Orang Asli Papua

- Menggambarkan bagaimana dalam 100 tahun, masyarakat Wondama telah mengalami transformasi dari yang sebelumnya dianggap terbelakang menjadi bangsa yang berbudaya, berpendidikan, dan berintegritas.
- Menggarisbawahi makna peringatan ini sebagai momentum kebangkitan SDM OAP untuk meraih masa depan yang lebih cerah.
- Menekankan peran penting generasi muda Wondama untuk melanjutkan perjuangan dan misi pembangunan.

3. Visi dan Harapan Masa Depan

- Menyampaikan komitmen untuk membangun Wondama yang lebih maju di segala sektor (ekonomi, pendidikan, pariwisata), tanpa meninggalkan akar budaya lokal.
- Mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah, tokoh agama, dan adat untuk bersinergi mewujudkan cita-cita bersama.
- Menegaskan visi untuk menjadikan Wondama sebagai pusat peradaban dan mercusuar bagi seluruh Tanah Papua

PERAYAAN SATU ABAD I.S. KEYNNE DAN PELETAKAN BATU PERTAMA PEMBANGUNAN BANDARA I.S. KEYNE WONDAMA



Pokja Papua Produktif, Lalu Suprpta mewakili Kepala Badan Pengarah Pembangunan Otonomi Khusus Papua Perwakilan Papua Barat (BP3OKP-PB) hadir dan ikut dalam peletakan batu pertama yang ke-9 pembangunan Bandara Dominee I.S. Keyne bersama Gubernur PB, Wakil Gubernur PB, Bupati Kabupaten Teluk Wondama, tokoh agama dan tokoh masyarakat pada peringatan satu abad peradaban orang papua di kabupaten Teluk Wondama, Tanggal 25 Oktober 2025, Jam 04.00 WIT s/d selesai.

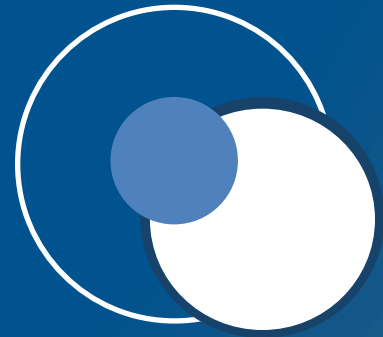
Upacara simbolis ini menghadirkan dua pimpinan daerah yaitu Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, yang menyatakan komitmen kuatnya untuk mempercepat konektivitas dan pemerataan pembangunan di wilayah tersebut. Kehadiran kedua pemimpin ini menegaskan pentingnya kolaborasi strategis antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam merealisasikan proyek strategis nasional.



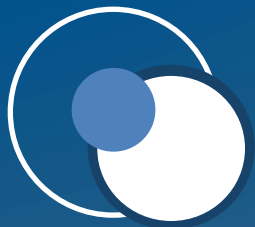
KESIMPULAN

1. Pembangunan bandara ini bukan hanya sekadar proyek infrastruktur, melainkan sebuah investasi untuk membuka isolasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat layanan publik bagi masyarakat Teluk Wondama dan sekitarnya.
2. Bandara yang mengusung nama seorang tokoh pendidikan dan misionaris legendaris di tanah Papua, Dominee Izaak Samuel Kijne, diharapkan dapat melanjutkan semangatnya dalam mencerdaskan dan memajukan kehidupan masyarakat.
3. Dengan adanya bandara ini, aksesibilitas menuju dan dari Teluk Wondama diproyeksikan akan meningkat signifikan. Hal ini akan memberikan dampak multiplier yang luas, mulai dari:
 - Penguatan Sektor Pariwisata: Membuka pintu bagi wisatawan untuk menjelajahi keindahan alam Teluk Wondama, yang merupakan bagian dari Segitiga Terumbu Karang Dunia.
 - Akselerasi Perekonomian: Mempermudah distribusi logistik dan komoditas unggulan lokal, sehingga mendorong kegiatan perdagangan dan investasi.
 - Peningkatan Layanan Sosial: Mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pokok lainnya yang selama ini terkendala oleh geografis.

Acara peletakan batu pertama ini menjadi penanda dimulainya tahap konstruksi fisik dan menjadi momentum bersejarah bagi seluruh masyarakat Papua Barat, khususnya di Kabupaten Teluk Wondama. Proyek ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk membangun Papua dari daerah-daerah terluar, mewujudkan kedaulatan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.



TERIMA KASIH



LAPORAN KEGIATAN OKTOBER POKJA PAPUA SEHAT

1. dr. Feliks Duwit, Sp, PD, M.Sc., MPH,
FINANSIM
2. Muga Romanus, S.H

06.11.2025



POKJA KEGIATAN BERSAMA



AUDIENS BERSAMA KAMAR DAGANG INDONESIA (KADIN) PAPUA BARAT

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2025

Tujuan:

Menjalin sinergi dalam pembangunan Provinsi Papua Barat, khususnya melalui POKJA Papua Produktif yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi lokal dan peningkatan kompetensi UMKM.

Capaian:

- ✓ Terbangunnya kesepahaman untuk meningkatkan sinergi BP3OKP dan KADIN
- ✓ Identifikasi tantangan: kemiskinan tinggi, pengangguran terbuka, kesulitan investasi
- ✓ Usulan strategis: perluasan bidang usaha berbasis komoditas unggulan (kopi, coklat)
- ✓ Komitmen keterlibatan KADIN dalam perencanaan pembangunan daerah

Peserta:

POKJA Papua Sehat, Papua Produktif, Papua Cerdas, POLHUKAM BP3OKP Papua Barat, dan KADIN Papua Barat

RAPAT BULANAN BP3OKP PAPUA BARAT DAN BP3OKP PAPUA BARAT DAYA SERTA SEKRETARIAT BP3OKP DI PAPUA BARAT

Capaian :

1. Sekretariat BPP dan Pokja menyusun Standard Operating Procedure (SOP) yang seragam untuk evaluasi dan pengelolaan dana otonomi khusus di seluruh Papua.
2. BPP Papua Barat mengoptimalkan realisasi belanja untuk kegiatan yang berdampak langsung pada masyarakat.
3. Pokja lebih aktif dalam menyusun Policy Brief dan kajian kebijakan yang relevan untuk disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Sekretariat Eksekutif.
4. BPP dan Pokja meningkatkan kapasitas melalui pelatihan dan pemahaman mendalam mengenai peraturan perencanaan seperti RIPPP.
5. Membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan universitas (UNIPA) untuk kajian dan penelitian yang mendukung kebijakan pembangunan daerah.

POKJA KEGIATAN BERSAMA



MENTERI DALAM NEGERI RI MENGGELAR RAPAT KOORDINASI BERSAMA KEP2OKP RI DAN BP3OKP RI

Pada tanggal 13 Oktober 2025, melakukan rapat Koordinasi Kelembagaan bersama

1. Menteri Dalam Negeri RI
2. Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua
3. BP3OKP RI

Arahan Presiden RI:

- ✓ Sinkronisasi perencanaan dan program antara K/L dengan Pemda
- ✓ Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan
- ✓ Komite Eksekutif berkolaborasi bersama BP3OKP RI dalam pelaksanaan Singronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi (SHEK)

AUDIENSI TERKAIT PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI PROGRAM PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DI PROVINSI PAPUA BARAT

Pada tanggal 28 Oktober 2025, BP3OKP Perwakilan Papua Barat menyelenggarakan pertemuan Bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Papua Barat, Diskusi mengenai kebudayaan dan pariwisata di Papua Barat.

BP3OKP Papua Barat menekankan pentingnya pelestarian budaya lokal, termasuk bahasa daerah dan nilai-nilai tradisional, yang harus diintegrasikan ke dalam kurikulum lokal sekolah dan kegiatan komunitas. Program-program seperti Tunas Bahasa dan festival seni budaya diharapkan dapat membangkitkan semangat pelestarian budaya. Sebagai penutup, BP3OKP Papua Barat mengarahkan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, dan media, untuk mengembangkan pariwisata Papua Barat secara berkelanjutan. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi wisata, meningkatkan promosi, serta memastikan adanya dukungan anggaran yang memadai. Adanya dana otonomi khusus dan kebijakan seperti Papua Produktif diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis masyarakat, dengan tujuan akhir meningkatkan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat Papua.

BADAN PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN OTONOMI KHUSUS PAPAUA

Terima Kasih

